



**PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS**

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS**

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunianya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Tahun Anggaran 2023.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Tahun Anggaran 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu disusun, semoga Laporan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan atau data dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) oleh Tim penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Kabupaten Bengkulu.

Bengkalis, 15 Januari 2024

INSPEKTUR DAERAH,



H. RADIUS AKIMA, S.Sos., M.T
PEMBINA UTAMA MUDA
NP. 19710522 199101 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Dasar Hukum	1
1.2. Visi dan Misi kepala Daerah.....	2
BAB II Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan daerah	7
2.1. Pelaksanaan Urusan Pilihan	7
BAB III Penutup	10

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Dasar Hukum	1
1.2. Visi dan Misi kepala Daerah.....	2
BAB II Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan daerah	7
2.1. Pelaksanaan Urusan Pilihan	7
BAB III Penutup	10

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Dalam Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis ini dilakukan berdasarkan pada sejumlah aturan dan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.
- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis, Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023;

- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023.

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2021-2026 bahwa pemerintah Kabupaten Bengkalis akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan RPJMD periode 2021-2026 sebagai berikut:

“ Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera “

MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Bengkalis 2021-2026 maka Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif Dalam Memajukan Perekonomian;
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter;
3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.

Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis, yaitu **“MISI II “Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter”**.

Sesuai dengan misi tersebut maka tujuan yang akan dicapai sebagai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam RPJMD periode 2021 – 2026 sebagai perangkat daerah yang melaksanakan bidang pengawasan adalah **“Mewujudkan Pemerintahan yang Berkarakter dan Berintegritas”** dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Terhadap Kepatuhan dan Efektifitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Menurunnya Tingkat Penyalahgunaan Wewenang pada Pemerintah Daerah
2. Optimalisasi Pengawasan Sistem Integritas Kinerja Pemerintah Daerah.
3. Meningkatnya Kompetensi dan Kelembagaan APIP

1. Jumlah Penduduk

Kabupaten Bengkalis yang terdiri Dari 11 Kecamatan, 136 Desa dan 19 kelurahan dengan Jumlah Penduduk 658.846 Jiwa dengan rincian untuk Laki-laki berjumlah 336.794 Jiwa sedangkan untuk Perempuan berjumlah 322.052 Jiwa, untuk data keseluruhan Kabupaten Bengkalis perkecamatan bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Bengkalis	46,885	45,246	92,131
2	Bantan	23,571	22,541	46,112
3	Bukit Batu	11,661	11,235	22,896
4	Mandau	84,965	81,863	166,828
5	Rupat	20,789	19,761	40,550
6	Rupat Utara	8,695	8,318	17,013

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
7	Siak Kecil	14.426	13,837	28,263
8	Pinggir	39,516	37,830	77,346
9	Bandar Laksamana	9,838	9,176	19,014
10	Talang Muandau	17,111	16,040	33,151
11	Bathin Solapan	59,337	56,205	115,542
Jumlah		336,794	322.052	658,846

2. Jumlah PNS

Rekapitulasi PNS pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Jenis Kelamin pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023.

NO.	NAMA SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SEKRETARIAT DAERAH	99	57	156
2	SEKRETARIAT DPRD	29	24	53
3	INSPEKTORAT DAERAH	26	15	41
4	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	34	20	54
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19	11	30
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	24	3	27
7	BADAN PENDAPATAN DAERAH	56	41	97
8	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	14	16	30
9	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	23	33	56
10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	35	15	50
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	35	20	55
12	DINAS KESEHATAN	122	592	714
13	DINAS KETAHANAN PANGAN	15	15	30

NO.	NAMA SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK	21	13	34
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	18	18	36
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	33	21	54
17	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	31	24	55
18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	68	12	80
19	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	37	4	41
20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15	19	34
21	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8	34	42
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	24	32	56
23	DINAS PENDIDIKAN	763	2.314	3.077
24	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	21	18	39
25	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	32	26	58
26	DINAS PERHUBUNGAN	85	11	96
27	DINAS PERIKANAN	24	28	52
28	DINAS PERKEBUNAN	30	15	45
29	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	29	25	54
30	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	32	20	52
31	DINAS SOSIAL	28	22	50
32	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	51	32	83
33	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	24	17	41
34	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	70	17	87
35	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKALIS	56	179	235
36	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KECAMATAN MANDAU	24	147	171

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SATUAN LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
37	KECAMATAN BENGKALIS	36	20	56
38	KECAMATAN BANTAN	19	4	23
39	KECAMATAN BUKIT BATU	20	7	27
40	KECAMATAN SIAK KECIL	24	7	31
41	KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA	12	4	16
42	KECAMATAN RUPAT	25	11	36
43	KECAMATAN RUPAT UTAMA	19	5	24
44	KECAMATAN MANDAU	46	27	73
45	KECAMATAN BATHIN SOLAPAN	13	4	17
46	KECAMATAN PINGGIR	22	12	34
47	KECAMATAN TALANG MUANDAU	14	-	14
	JUMLAH TOTAL	2306	4011	6317

BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

1.1 Pelaksanaan Urusan Pilihan

**BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

2.1 Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET		REALISASI						PERMASALAHAN	SOLUSI	TENDAKLAHUT REKOMENDASI DPRD						
					KELUARAN	HASIL	Rp.	K	%	H	%	Rp.				%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							18.812.436.158	14.316.916.943													
KELOMPOK 1. PELAYANAN																					
1. Administrasi, pengorganisasian, dan evaluasi kinerja perangkat daerah																					
				1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	Perencanaan Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	%	280.344.000	5	Dokumen	100	100	%	100	280.344.000	100	%	
				2. Analisis dan penyusunan laporan kinerja komite dan efektifitas kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan SKPD Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan SKPD Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	Perencanaan Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	%	150.081.000	5	Laporan	100	100	%	100	150.081.000	100	%	
				3. Evaluasi Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	Perencanaan Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	%	97.977.000	4	Laporan	100	100	%	100	97.977.000	100	%	
				1. Administrasi keuangan perangkat daerah	1. Penyusunan per dan tunggapan ASN	Jumlah Orang yang Berencana Gaji dan Tunjangan ASN	41	Orang	Perencanaan Perencanaan Laporan Keuangan / Realisasi Keuangan	100	%	6.956.084.370	41	Orang	100	100	%	100	6.956.084.370	100	%
				2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	Perencanaan Perencanaan Laporan Keuangan / Realisasi Keuangan	100	%	63.245.000	1	Laporan	100	100	%	100	63.245.000	100	%	
				1. Administrasi Barang Milik Daerah, baik Perangkat Daerah	1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dokumen	Perencanaan Perencanaan Pengamanan Barang Milik Daerah	100	%	134.400.000	5	Dokumen	100	100	%	100	134.400.000	100	%
				1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Paksi dan Perangkat	Jumlah Paket Paksi dan Perangkat	55	Paket	Perencanaan Capaian Perencanaan Kompetensi Aparatur Perangkat Daerah	100	%	90	Paket	100	100	%	100	90	100	%	
				2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berkeadilan	Jumlah Pegawai Berkeadilan yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36	Orang	Perencanaan Capaian Perencanaan Kompetensi Aparatur Perangkat Daerah	100	%	447.056.000	36	Orang	100	100	%	100	447.056.000	100	%	
				3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	150	Orang	Perencanaan Capaian Perencanaan Kompetensi Aparatur Perangkat Daerah	100	%	71.005.000	150	Orang	100	100	%	100	71.005.000	100	%	
				4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20	Orang	Perencanaan Capaian Perencanaan Kompetensi Aparatur Perangkat Daerah	100	%	159.939.000	20	Orang	100	100	%	100	159.939.000	100	%	
				1. Administrasi umum perangkat daerah	1. Penyediaan komponen produksi (tinta, perantara) bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Produksi (tinta, perantara) bangunan kantor yang Disediakan	11	Paket	Perencanaan Perencanaan Kebutuhan Umum Pemungutan Pajak	100	%	93.267.000	11	Paket	100	100	%	100	93.267.000	100	%
				2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	90	Paket	Perencanaan Perencanaan Kebutuhan Umum Pemungutan Pajak	100	%	205.120.000	90	Paket	100	100	%	100	205.120.000	100	%	
				3. Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1500	Paket	Perencanaan Perencanaan Kebutuhan Umum Pemungutan Pajak	100	%	294.750.000	1500	Paket	100	100	%	100	294.750.000	100	%	
				4. Penyediaan barang cetakan dan pengorganisasian	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengorganisasian yang Disediakan	20	Paket	Perencanaan Perencanaan Kebutuhan Umum Pemungutan Pajak	100	%	185.020.000	20	Paket	100	100	%	100	185.020.000	100	%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
					5. Penyediaan bahan baku dan peralatan serundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Penunjang Urusan yang Disediakan	20	dokumen	Pemenuhan Kebutuhan Urusan Penunjang Kegiatan Pengawasan	100	%	45.000.000	20	dokumen	100	100	%	100	32.800.000	72,89	%	
					6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170	laporan	Pemenuhan Kebutuhan Urusan Penunjang Kegiatan Pengawasan	100	%	946.791.000	170	laporan	100	100	%	100	944.257.570	99,73	%	
					7. Dukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	dokumen	Pemenuhan Kebutuhan Urusan Penunjang Kegiatan Pengawasan	100	%	190.600.000	1	dokumen	100	100	%	100	190.540.000	99,97	%	
				6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1. Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3	unit	Pemenuhan Infrastruktur Kapabilitas APSP	100	%	932.002.000	3	unit	100	90	%	90		0,90	%	
					2. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	unit	Pemenuhan Infrastruktur Kapabilitas APSP	100	%	663.529.000	4	unit	100	90	%	90		0,90	%	
					3. Pengadaan mobil	Jumlah Paket Mobil yang Disediakan	92	unit	Pemenuhan Infrastruktur Kapabilitas APSP	100	%	305.296.000	92	unit	100	90	%	90		146.175.100	48,00	%
					4. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13	unit	Pemenuhan Infrastruktur Kapabilitas APSP	100	%	1.336.899.000	13	unit	100	90	%	90		470.716.000	35,21	%
				7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	laporan	Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Kegiatan Pengawasan	100	%	137.900.000	5	laporan	100	100	%	100		114.306.000	83,18	%
					2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	laporan	Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Kegiatan Pengawasan	100	%	219.482.000	3	laporan	100	100	%	100		202.947.885	92,46	%
					3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	laporan	Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Kegiatan Pengawasan	100	%	40.119.000	2	laporan	100	100	%	100		40.318.080	100,00	%
				8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1. Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak, dan perorangan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perorangan	13	unit	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Kegiatan Pengawasan	100	%	271.963.000	13	unit	100	100	%	100		308.897.808	113,61	%
					2. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1	unit	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Kegiatan Pengawasan	100	%	2.053.724.000	1	unit	100	100	%	100		707.810.000	34,46	%
					3. Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	20	unit	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Kegiatan Pengawasan	100	%	151.042.000	20	unit	100	100	%	100		149.181.233	97,72	%
				B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN										2.587.040.000					2.495.299.652			
				KEGIATANNYA SELURUT																		
				1. Penyelenggaraan pengawasan internal	1. Pengawasan kinerja pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	25	laporan	Pemenuhan Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK dan Pemenuhan Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APSP	65	%	686.028.000	25	laporan	100	80	%	123,1		665.324.455	96,98	%
					2. Berku laporan kinerja	Jumlah Laporan Hasil Rerku Laporan Kinerja	25	laporan	Pemenuhan Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK dan Pemenuhan Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APSP	60	%	352.096.000	25	laporan	100	90	%	123,1		346.992.500	98,41	%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14													
					3	Riviu laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Riviu Laporan Keuangan	1	laporan	Persentase Capaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan BPK dan Persentase Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APID	65	%	72.648.000	1	laporan	100	80	%	123,1	71.438.200	96,53	%				
					4	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	11	laporan	Persentase Capaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan BPK dan Persentase Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APID	65	%	323.750.000	11	laporan	100	80	%	123,1	305.537.432	94,37	%				
					5	Kerja sama pengamanan internal	Jumlah Kecepatan Pengawasan Internal yang Terpenuhi	5	kecepatan	Persentase Capaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan BPK dan Persentase Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APID	65	%	362.872.000	5	kecepatan	100	80	%	123,1	359.316.094	99,02	%				
					6	Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APID	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APID	2	dokumen	Persentase Capaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan BPK dan Persentase Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APID	65	%	421.824.000	2	dokumen	100	80	%	123,1	410.803.986	97,39	%				
				2	Penyenggaraan pengawasan pengawasan dengan tujuan tertentu	1	Pengawasan penyediaan keuangan negara/daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	1	laporan	Persentase Tindak Lanjut Pengadilan Masyarakat	80	%	62.430.000	1	laporan	100	80	%	100	55.066.800	89,34	%			
				2		Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10	laporan	Persentase Tindak Lanjut Pengadilan Masyarakat	80	%	204.888.000	10	laporan	100	80	%	100	280.800.175	92,10	%				
					C. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						1.430.198.000			1.286.373.712												
					SEKUTANNYA MELIPUTI:																					
				1	Bantuan dan asistensi	1	Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	46	Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi	100	%	71.050.000	46	Perangkat Daerah	100	80	%	80	685.056.702	96,08	%			
				2		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10	Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi	100	%	230.136.000	10	Perangkat Daerah	100	80	%	80	192.604.638	83,69	%				
				3		Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4	Kegiatan	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi	100	%	400.870.000	4	Kegiatan	100	80	%	80	332.750.351	83,01	%				
				4		Pendampingan dan asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	46	Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi	100	%	86.132.000	46	Perangkat Daerah	100	80	%	80	77.852.039	90,44	%				
					JUMLAH URUSAN INSPEKTORAT						22.829.674.158			JUMLAH			18.100.590.307									

BAB III

PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah(LKPJ) Tahun Anggaran 2023 ini disusun, dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, semoga Laporan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan atau data dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) oleh Tim penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Kabupaten Bengkalis .

Bengkalis, 15 Januari 2024

INSPEKTUR DAERAH,



H. RADIUS AKIMA, S.Sos., M.T

PEMBINA UTAMA MUDA

NP. 19710522 199101 1 001